

ABSTRAK

Konflik sosial yang melibatkan aliran Syiah dan Sunni di kabupaten sampang telah menjadi perhatian dalam konteks kerukunan beragama di Indonesia. konflik yang terjadi dikarenakan adanya perbedaan konsep ataupun praktek yang dianut dan dijalankan oleh pemeluk agama yang di percayainya. Hingga mengalami pengusiran dari tempat tinggal oleh aliran Syiah. Konflik tersebut terjadi di desa karang gayam dan desa blu'uran. Konflik yang memiliki akar yang kompleks melibatkan faktor-faktor agama, sosial, ekonomi dan politik mengakibatkan munculnya perbedaan interpretasi dan diskriminasi yang berujung penolakan, hingga menjadikan trauma bagi kelompok yang menjadi konflik. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kewenangan pemerintah serta upayanya terhadap pasca kepulangan mantan penganut syiah di kabupaten sampang dan bagaimana kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam mencegah konflik tersebut. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode empiris, dengan melalui pendekatan Sosiologi hukum yang didasarkan pada pikiran hukum sebagai cara pengarah sosial yang menggunakan gaya empiris. Kemudian digabungkan dengan wawancara dan kajian undang-undang serta kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pemerintah daerah kabupaten sampang dalam mencegah konflik berbasis agama, terdapat beberapa upaya diantaranya melakukan pembaitan sebelum kembali pulang yang dibantu oleh tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat, pemerintah daerah membentuk tim rekonsiliasi penyelesaian konflik sosial serta membentuk tim 5, serta dibantu oleh aparat keamanan sebagai bentuk pencegahan konflik berbasis agama. Namun, upaya tersebut mengalami kendala diantaranya pada pasca kepulangan rekonsiliasi tersebut yang seharusnya berfokus pada rehabilitasi tidak berjalan maksimal.

Kata kunci: **konflik sosial, Sunni-Syiah, upaya pemerintah**

Abstract

Religious-based conflicts involving Shia and Sunni communities in Sampang Regency have become a concern in the context of religious harmony in Indonesia. The conflict that occurred was due to differences in concepts or practices adopted and carried out by adherents of the religion they believed in. Until they were expelled from their homes by the Shia sect. The conflict occurred in Karang Gayam Village and Blu'uran Village. The conflict, which has complex roots involving religious, social, economic and political factors, resulted in differences in interpretation and discrimination that led to rejection, causing trauma for the groups involved in the conflict. Therefore, this study was conducted to determine the government's authority and its efforts towards the post-return of former Shia adherents in Sampang Regency and the obstacles faced by the local government in preventing the conflict. The research method used is an empirical method, by using a legal sociology approach based on legal thinking as a way of social direction using an empirical style. Then combined with interviews and studies of laws and literature. The results of the study indicate that the efforts of the Sampang district government in preventing religious-based conflicts, there are several efforts including conducting a pledge before returning home assisted by religious leaders, traditional leaders, and community leaders, the local government formed a social conflict resolution reconciliation team and formed a team of 5, and assisted by security forces as a form of preventing religious-based conflicts. However, these efforts have encountered obstacles, including after returning home, the reconciliation which should have focused on rehabilitation did not run optimally.

Keywords: *social conflict, Sunni-Shia, government efforts*